

## STANDAR KOMPETENSI IPS-SD: STRUKTUR DASAR DAN PARADIGMA PENGEMBANGANNYA

*Mohammad Imam Farisi*  
*Jurusan IPS, Universitas Terbuka Surabaya*

**Abstract:** *Document analysis of the content and competency standard for elementary school was aimed to find the structure of elementary social studies competencies and its development paradigm. Result of analyse was indicate that the structure of elementary social studies competencies woke up from three students' native capacities, that is personal, socio-cultural, and intellectual competencies. Elementary social studies is develop based on intellectual-scientific based paradigm.*

**Key words:** *competencies structure, paradigm, standard of contents, standard of grade competencies, scientific-based education.*

### PENDAHULUAN

Konsep kompetensi menjadi kata kunci dalam standarisasi sistem pendidikan nasional, khususnya standarisasi isi dan kualifikasi kemampuan lulusan pada satuan pendidikan dasar dan menengah. "Standarisasi" merupakan kata kunci dalam reformasi sistem pendidikan nasional, seperti tertuang di dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, PP. nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Permendiknas nomor 22 dan 23 tahun 2006 tentang Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan pada satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Standarisasi kompetensi isi dan hasil pendidikan semacam itu, pada dasarnya

merupakan sebuah peta konseptual tentang kualitas isi dan produk dari sistem pendidikan nasional, khususnya pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Karenanya, komponen-komponen struktural dari peta konseptual tentang standar kompetensi penting dianalisis untuk menemukan struktur dasar kompetensi yang dikonsepsikan, beserta kerangka berpikir atau paradigma yang mendasari pengembangannya.

Tulisan ini, merupakan hasil analisis tentang "struktur dasar kompetensi IPS-SD" dan "kerangka pemikiran atau paradigma yang menjadi dasar pengembangannya".

## KERANGKA ANALISIS

Analisis terhadap struktur dasar kompetensi IPS-SD dilakukan melalui analisis dokumen (*document analysis*) Permendiknas no. 22 dan 23 tahun 2006, khususnya tentang standar isi dan standar kompetensi lulusan mata pelajaran IPS-SD, dan dokumen-dokumen lain yang terkait. Analisis difokuskan pada rumusan: standar kompetensi kelompok mata pelajaran (SK-KMP), standar kompetensi lulusan mata pelajaran (SKL-MP), standar kompetensi mata pelajaran (SK-MP), dan kompetensi dasar mata pelajaran (KD-MP) IPS-SD.

Sedangkan analisis terhadap kerangka berpikir atau paradigma yang mendasari pengembangan struktur dasar kompetensi IPS-SD, secara epistemologis seharusnya dilakukan melalui analisis dokumen yang memuat konsensus-konsensus akademik (*academic agreements*) dari komunitas pakar suatu bidang disiplin keilmuan (Kuhn, 2001). Dalam hal ini adalah dokumen yang memuat konsensus-konsensus akademik dari komunitas ilmuwan ilmu-ilmu sosial dan IPS, yaitu HISPIPSI (Himpunan Ilmuwan Sosial dan Pendidikan IPS Indonesia) yang dibentuk pada tahun 1989.

Namun, seperti diakui oleh Winataputra (2001a, 2001b, 2005), analisis seperti itu tak

mungkin dilakukan, karena di Indonesia belum ada lembaga profesional bidang pendidikan IPS setua dan sekuat pengaruh CSS (*Committee Social Studies*), NCSS (*National Council for Social Studies*) dan atau SSEC (*Social Studies Education Commission*) dalam pengembangan kurikulum nasional IPS di Amerika Serikat. Menurut Winataputra, HISPIPSI usianya masih sangat muda dan produktivitas akademiknya masih belum optimal, serta masih terbatas pada pertemuan tahunan dan komunikasi antaranggota secara insidental.

Dalam situasi keterbatasan seperti itu, dengan merujuk pada pemikiran Olivia (1997:39-41) bahwa “...*curriculum responds to and is changed by social forces, philosophical positions, psychological principles, accumulating knowledge, and educational leadership at its moment in history*”; hasil analisis Soedijarto (2004:90) bahwa hampir semua kurikulum disusun dan dikembangkan berdasarkan atas asumsi teoretik (dan filosofis), kecuali kurikulum 1975 dan kurikulum PPSP (Projek Perintis Sekolah Pembangunan (1974–1981); serta bahwa pengembangan perangkat kurikulum dan standar kompetensi juga melalui proses deliberasi di antara para pakar IPS, maka analisis terhadap dasar-dasar paradigmatis pengembangan struktur dasar

kompetensi IPS-SD dilakukan melalui analisis dokumen kurikulum IPS-SD 1968—2004, dan dokumen Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan yang terdapat di dalam Permendiknas no. 22 dan 23 tahun 2006 yang menjadi dasar pengembangan KTSP untuk mata pelajaran IPS-SD.

Penulis menyadari, bahwa dari perspektif epistemologi Kuhnian, menjadikan dokumen kurikulum atau peraturan sebagai dasar analisis sebuah paradigma, memang tidak sepenuhnya dibenarkan. Selain alasan seperti dikemukakan Winataputra di atas, juga karena dokumen kurikulum atau peraturan tidak sepenuhnya merupakan konsensus akademik, tetapi juga ada intervensi dari otoritas pimpinan lembaga yang berwenang mengembangkan kurikulum (Puskur atau Diknas) yang sering bersifat teknis-operasional.

Untuk mengantisipasi keterbatasan metodologis tersebut, analisis dasar-dasar paradigmatis IPS-SD melalui dokumen kurikulum atau peraturan-peraturan berkaitan dengan kurikulum, dilakukan sejalan dengan analisis paradigmatis yang lazim dilakukan di kalangan komunitas pakar IPS, seperti Barr, Barth, & Shermis (1977), Saxe (1991), Winataputra (2001a), atau yang lain. Hasil-hasil analisis paradigmatis mereka dapat dipandang sebagai eksemplar-

eksemplar penelitian paradigmatis ke-IPS-an.

Berdasarkan eksemplar-eksemplar itu pula, analisis dasar-dasar paradigmatis pengembangan struktur dasar kompetensi IPS-SD difokuskan pada tiga aspek kurikulum dan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan, yaitu: (1) definisi/pengertian, (2) tujuan, dan (3) pola pengorganisasian struktur matriks kurikuler sebagai bahan kajian kurikulum matapelajaran IPS-SD.

Definisi/pengertian dijadikan dasar analisis paradigmatis, karena sebuah definisi/pengertian merupakan sebuah generalisasi simbolik (*symbolic generalization*) yang membatasi—karena terkadang merupakan hukum—dan sekaligus memberikan pedoman—karena kerap bersifat persuasif—kepada pengembang dan pelaksana kurikulum, apa dan bagaimana mereka harus berpikir, bersikap atau bertindak terhadap sesuatu seperti yang didefinisikan/diartikan (Kuhn, 2001:177-178).

Definisi/pengertian juga dapat “...to eliminate ambiguity; to clarify meaning; to explain theoretical; and to influence someone’s attitudes” (Gardner, ed. 1975:9-10) kepada setiap pengembang dan pelaksana kurikulum. Karenanya, sebuah definisi/pengertian “...is not a just semantic games...it is a serious semantic games, because the definitions we

*attach to terms do affect how we think...lead us to believe and to act in certain ways*" (Shaver, 1977:144). Tujuan dijadikan dasar analisis paradigmatik, karena tujuan memuat kriteria-kriteria dan standar-standar kompetensi tertentu yang harus dicapai setelah siswa menyelesaikan program kurikuler. Dari kriteria-kriteria dan standar-standar kompetensi tersebut, rumusan tujuan bisa dikenali, apakah mencerminkan dan mengarah pada pencapaian "tujuan keilmuan" atau "tujuan pendidikan". Struktur matriks kurikuler dijadikan dasar analisis paradigmatik, karena dari struktur matriks kurikuler dapat dikenali pendekatan dan pola pengorganisasian bahan-bahan kajian kurikulumnya, apakah diorganisasi menurut struktur muatan disiplin keilmuan berdasarkan prinsip "*systematically organized, scholarly bodies of knowledge*", ataukah diorganisasi menurut struktur muatan kependidikan berdasarkan prinsip "*a psychologically or pedagogically structured selection of instructional content*" (Frasser & West, dalam Somantri, 2001:87).

## **STRUKTUR DASAR KOMPETENSI IPS-SD**

Struktur dasar kompetensi IPS-SD (SDK IPS-SD) dimaksudkan sebagai pola organisasi kompetensi-kompetensi esensial IPS-SD

yang bersifat sistemik, saling berkaitan antarkompetensi sebagai sebuah totalitas atau kesatuan. Hasil analisis terhadap kedua Permendiknas menunjukkan bahwa SDK IPS-SD diorganisasi secara sistemik dari tiga struktur dasar kompetensi yang secara substantif merupakan "kemampuan-kemampuan dasar alamiah" (*native capacities* atau *natural capabilities*) setiap siswa dalam upaya mengembangkan jati dirinya sebagai makhluk personal, sosio-kultural, dan intelektual (cf. Dewey, 1964). Ketiga struktur dasar kompetensi yang dimaksudkan adalah: (1) kompetensi personal; (2) kompetensi sosio-kultural; dan (3) kompetensi intelektual-keilmuan.

Kompetensi personal adalah kemampuan siswa membentuk dan mengembangkan kepribadiannya sebagai makhluk personal atau individu dalam berbagai konteks kehidupan keseharian personal atau sosio-kultural. Dengan kata lain, kompetensi personal dimaksudkan sebagai upaya *mengenalkan dan memahami* siswa atas identitas dirinya, dan membangun "*kesadaran diri*" (*self awareness*) siswa sebagai *makhluk pribadi* (*homo persona*) dengan segala keunikan dan keutuhan pribadinya yang senantiasa akan terus berkembang (Hasan, 1993; Sumaatmadja, 2003;

Wiriaatmadja, 2003). Kompetensi personal ini selama perkembangan kurikulum IPS-SD 1964—1994/1999 tampak terpinggirkan, tidak dinyatakan secara eksplisit (Hasan, 2002).

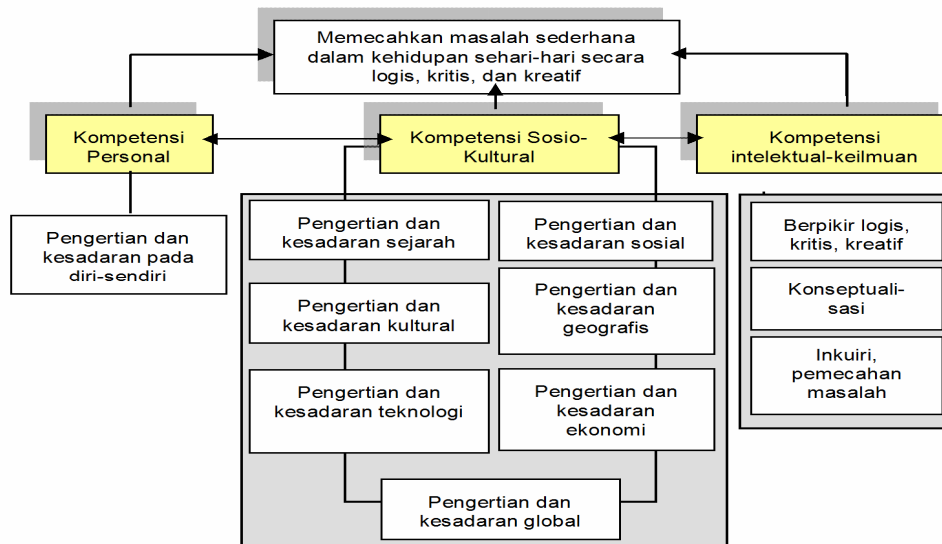
Kompetensi sosio-kultural adalah kemampuan siswa membentuk dan mengembangkan karakter atau jati dirinya sebagai makhluk sosial dan kultural (*homo socius and cultural*). Dengan kata lain, kompetensi sosio-kultural ini berkaitan dengan pembentukan dan pengembangan “kesadaran” dan “kepribadian” siswa sebagai makhluk sosio-kultural (Saxe, 1991; Stopsky & Lee, 1994). Kompetensi sosio-kultural ini dicirikan oleh kesadaran dan pemahaman diri terhadap arti penting orang lain, toleransi, kerjasama, dan relasi sosio-kultural dalam berbagai konteks kehidupan (sosial, kultural, historis, ekonomis, geografis), sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan personal, sosio-kulturalnya kini dan mendatang.

Kompetensi intelektual-keilmuan adalah kemampuan siswa untuk berpikir atau bernalar atas dasar kesadaran atau keyakinan diri atas sesuatu baik yang bersifat fisikal, sosial, kultural, ekonomis, dll. (inderawi

atau tidak) yang dipandang memiliki makna baik bagi dirinya, orang lain, dan lingkungannya (Dewey, 1910). Kompetensi intelektual-keilmuan meliputi kemampuan “berpikir standar” dan “berpikir ilmiah”. Berpikir standar adalah kemampuan berpikir (*thinking abilities*), atau “cara-cara berpikir” (*ways of thinking*) yang bersifat “standar” bagi setiap manusia, tanpa harus dikaitkan dengan cara-cara berpikir suatu disiplin ilmu tertentu, melainkan lebih pada upaya melatih dan membina siswa agar mampu berpikir yang dapat dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan perkembangan hidup mereka, baik secara psikologis, sosial dan budaya pada masa kini dan mendatang (Hasan, 1993). Berpikir ilmiah adalah kemampuan berpikir (*thinking abilities*), atau “cara-cara berpikir” (*ways of thinking*) berdasarkan pada kesadaran adanya masalah yang perlu mendapatkan pemecahan secara kritis-reflektif, objektif, berdasarkan fakta yang mendukung dan teruji.

Struktur dasar kompetensi IPS-SD di dalam kedua Permendiknas secara skematik digambarkan sebagai berikut:

Bagan 1  
Peta Struktur Dasar Kompetensi IPS-SD

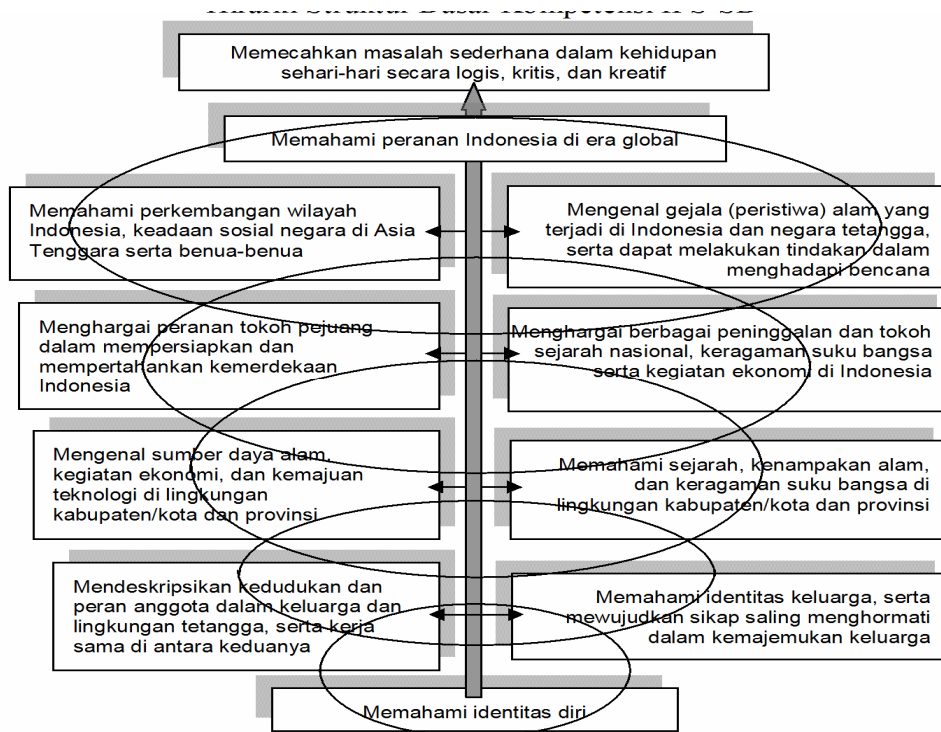


Ketiga struktur dasar kompetensi IPS-SD di atas, dikembangkan ke dalam tiga klasifikasi kompetensi. *Pertama*, SK-KMP IPTEK khusus untuk IPS-SD berjumlah lima standar kompetensi, dan semuanya merupakan kompetensi intelektual-keilmuan, tidak ada satupun standar kompetensi personal dan sosio-kultural. *Kedua*, SKL-MP IPS-SD berjumlah 10 standar kompetensi, terbagi menjadi satu standar kompetensi personal; lima standar kompetensi sosio-kultural; dan empat standar kompetensi intelektual-keilmuan. *Ketiga*, SK-MP IPS-SD berjumlah 14 standar kompetensi, terbagi menjadi satu standar kompetensi

personal; tiga standar kompetensi sosio-kultural; dan 10 standar kompetensi intelektual-keilmuan. Keempat belas SK-KMP IPS-SD tersebut selanjutnya dikembangkan menjadi 48 KD-MP.

Selain itu, salah satu karakteristik dari struktur dasar kompetensi IPS-SD yang dapat dianalisis dari kedua Permendiknas, adalah bahwa seluruh kompetensi diorganisasi atau disusun secara hierarkhis dari kompetensi yang berkaitan dengan "kehidupan diri" siswa (*self*) kemudian berkembang secara sirkuler menuju kompetensi yang berkaitan dengan "kehidupan global", seperti digambarkan berikut ini.

Bagan 2  
Hirarki Struktur Dasar Kompetensi IPS-SD



### PARADIGMA PENGEMBANGAN STRUKTUR DASAR KOMPETENSI IPS-SD

Hasil analisis dokumen kurikulum IPS-SD 1968—2004 dan Permendiknas no. 22 dan 23 tahun 2006 menunjukkan bahwa paradigma pengembangan struktur dasar kompetensi IPS-SD adalah IPS sebagai “pendidikan berbasis intelektual-keilmuan” (*scientific and intellectual based education*), bukan sebagai “pendidikan keilmuan” atau “pendidikan disiplin ilmu” (*scientific discipline education*). Dalam konteks IPS-SD, perbedaan antara keduanya

dapat dijelaskan dari dua aspek, yaitu tujuan dan pola pengorganisasian bahan kurikuler.

Paradigma IPS sebagai pendidikan berbasis intelektual-keilmuan, memandang IPS-SD sebagai muatan kurikuler yang bertujuan membekali siswa pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan berkaitan dengan berbagai realitas, fenomena, isu, dan atau masalah masyarakat dari berbagai aspeknya (sejarah, ekonomi, budaya, geografi, dll) berdasarkan *cara-cara berpikir standar* sesuai dengan karakteristik dan kapasitas siswa, dan *cara-cara berpikir*

*ilmiah* secara fleksibel, tidak seketat dan sesistematis cara-cara berpikir, bersikap, dan bertindak ilmiah di kalangan komunitas ilmuwan. Penggunaan cara-cara berpikir, bersikap, dan bertindak ilmiah ini tetap ditempatkan dalam konteks keragaman cara-cara berpikir, bersikap, dan bertindak standar bagi setiap siswa, karena penggunaan cara-cara berpikir, bersikap, dan bertindak ilmiah hanya sebatas sebagai pengenalan awal tentang disiplin ilmiah, bukan tujuan utama. Bahan-bahan kurikulumnya, terdiri dari bahan-bahan yang bersumber dari hasil-hasil kajian ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang diorganisasi berdasarkan prinsip "*a psychologically or pedagogically structured selection of instructional content*" agar sesuai dengan karakteristik dan kapasitas siswa (Frasser & West, dalam Somantri, 2001:87). Maksudnya, bahwa pola seleksi dan organisasi bahan-bahan kurikuler IPS-SD harus sesuai dengan tingkat perkembangan intelektual siswa SD (psikologis), dan memenuhi prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik (pedagogis). Dalam teori pengembangan kurikulum IPS-SD, prinsip ini diwujudkan dalam model "*the widening student's horizon*" dari CSS (*Commission for Social Studies*), "*expanding community approach*" dari Hanna, atau "*spiral curriculum*" dari Bruner, dengan menempatkan siswa sebagai

subjek pada pusat sistem kurikulum (*a self-centric focus*) dengan beberapa topik/unit/tema sebagai elemen pengintegrasinya (Dewey, 1962; Bruner, 1978; Saxe, 1991).

Paradigma IPS sebagai pendidikan berbasis intelektual-keilmuan ini, mengakomodasi dua tradisi *Social Studies* (Barr, Barth, & Shermis, 1978), yaitu: (1) tradisi IPS sebagai transmisi kewarganegaraan (*social studies taught as citizenship transmission*) yang bertujuan membentuk siswa menjadi warganegara yang baik melalui pewarisan pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan, dengan bahan-bahan kurikuler yang dipilih dari pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan yang sudah dipandang sah oleh pakar ilmu-ilmu sosial; dan (2) tradisi IPS sebagai berpikir reflektif dan inkuiri (*social studies taught as reflective inquiry*), yang bertujuan membentuk siswa menjadi warganegara yang baik melalui pembentukan dan pengembangan kemampuan memecahkan masalah-masalah sosial secara reflektif dan inkuisi, dengan bahan-bahan kurikuler dipilih dan diorganisasikan dari berbagai fenomena, isu, dan masalah-masalah sosial dan kewarganegaraan dalam kehidupan masyarakat yang sudah dipandang sah oleh pakar ilmu-ilmu sosial dan atau berdasarkan kelayakan dan



kemanfaatannya bagi siswa. Bahan-bahan kajian kurikuler tersebut diorganisasi dalam unit-unit, topik-topik, pokok-pokok bahasan, dan atau tema-tema yang dikembangkan secara sirkuler-spiral dari lingkungan terdekat hingga lingkungan terjauh dari kehidupan siswa.

Sedangkan paradigma IPS sebagai pendidikan keilmuan atau pendidikan disiplin ilmu, memandang IPS-SD sebagai muatan kurikuler yang bertujuan mengembangkan kemampuan siswa untuk “menguasai struktur keilmuan atau disiplin ilmu-ilmu sosial” (konseptual, sintaktikal, dan normatif) (Bruner, 1978). Dalam bidang kajian kurikulum, paradigma ini dikenal sebagai “*structured curriculum*” yang dasar-dasar epistemologisnya dikembangkan oleh Jerome S Bruner dalam bukunya “*The Process of Education*”. Ditegaskan oleh Bruner, bahwa “*the structure of a subject*” haruslah dikaitkan dengan teori tentang struktur pengetahuan (*structure of knowledge*). Asumsinya adalah bahwa intelektualitas atau cara-cara manusia membangun pengetahuan “*sama atau paralel*” bagi semua manusia, tak pandang usia—tak terkecuali pada anak dan ilmuwan. Karena itu, “*the foundations of any subject may be taught anybody at any age in some [regardless of their age]*” (Bruner, 1978;12, 14, 40). Bahwa “anak adalah

seorang ilmuwan” (*the young child as scientiest*) atau “pembangun teori” (*children as theory builder*) (Chaille & Britain, 1991:3-9). Implikasinya, adalah bahwa struktur materi kurikuler dapat diturunkan dari struktur disiplin ilmu (*a structured-oriented curriculum*), dan tugas para ilmuwan lah yang memilih dan merumuskan masing-masing struktur disiplin untuk dijadikan sebagai struktur isi kurikulum. Atau seperti dikatakan Shavelson, “*a structure of a subject matter, ultimately, rests in the minds of the great scientists*” (Philips, 1987:139); sejalan dengan “*garis berpikir keilmuan*” atau “*seperti telah ditetapkan oleh para ilmuwan sosial*” (Somantri, 2001; Wignyosoebroto, 2001).

Menurut Bruner (1978) pengembangan struktur muatan kurikulum berdasarkan “struktur disiplin ilmu”, memberikan empat keuntungan: (1) isi kurikulum menjadi semakin komprehensif (*more comprehensible*) karena hanya gagasan dan prinsip dasar tentang objek yang dikaji; (2) menyederhanakan cara menyimpan dan menggunakan ingatan ketika suatu saat dibutuhkan; (3) memudahkan terjadinya “pengalihan latihan” (*transfer of training*) kemampuan hal-hal lain, baik dalam situasi khusus (*specific transfer of training*) maupun dalam segala situasi (*non-specific transfer of training*); dan (4) dapat mengembangkan ketajaman

analisis sehingga dapat membedakan perbedaan antara pengetahuan dasar (*elementary knowledge*) dengan pengetahuan yang lebih maju (*advanced knowledge*). Paradigma IPS sebagai pendidikan keilmuan atau pendidikan disiplin ilmu ini, mengakomodasi tradisi *Social Studies* (Barr, Barth, & Shermis, 1978), yaitu tradisi IPS sebagai ilmu-ilmu sosial (*social studies taught as social sciences*) yang bertujuan membentuk siswa menjadi warganegara yang baik melalui penguasaan struktur—konseptual dan sintaksis—disiplin ilmu-ilmu sosial. Prinsip pengorganisasiannya adalah “*a systematically organized, scholarly bodies of knowledge*” (Frasser & West, dalam Somantri, 2001:87). Maksudnya, bahwa pola seleksi dan organisasi bahan-bahan kurikuler IPS-SD secara ketat dan sistematis mengikuti struktur bahan kajian (*subject matter*) disiplin ilmu-ilmu sosial. Terdiri dari fakta-fakta, konsep-konsep, dan generalisasi-generalisasi ilmu-ilmu sosial tentang berbagai fenomena, isu, dan masalah-masalah sosial dan kewarganegaraan dalam kehidupan masyarakat yang sudah dipandang sah oleh pakar ilmu-ilmu sosial.

Pengembangan struktur dasar kompetensi IPS-SD berdasarkan paradigma IPS sebagai “pendidikan berbasis intelektual-keilmuan”, sejalan

dengan pandangan Jarolimek (1977:4), bahwa *social studies* tidak dimaksudkan untuk menjadikan para siswa sebagai “*miniature social scientist*”, dan karenanya, tidak semua kebutuhan-kebutuhan pembelajarannya harus pula mengikuti pola yang sama dari para ilmuwan. Menanggapi kurikulum IPS-SD tahun 1975, Soetjipto, ed. (1980 :13) juga menegaskan bahwa IPS-SD, *tidak mengikuti pola ilmu pengetahuan tertentu secara ketat...karena penjelasan itu (tentang peristiwa-peristiwa penting di alam sekitar anak didik) tidak harus diberikan menurut pola ilmiah yang masih asing bagi anak...Para siswa yang tak semua akan menjadi ahli dalam mata pelajaran tertentu lebih baik diperkenalkan kepada ilmu pengetahuan sosial secara umum daripada diberikan menurut ssubjek (disiplin ilmu)*” (cetak miring dari penulis).

Sekalipun dasar-dasar paradigmatis struktur dasar kompetensi IPS-SD dikembangkan berdasarkan pandangan bahwa IPS-SD sebagai “pendidikan berbasis intelektual-keilmuan” bukan sebagai “pendidikan keilmuan” atau “pendidikan disiplin ilmu”, namun seperti akan ditunjukkan dari hasil analisis berikut, dalam beberapa perkembangan kurikulum IPS-SD telah terjadi kerancuan-kerancuan konseptual, inkonsistensi, dan ambiguitas paradigmatis yang

sangat membingungkan. Dugaan penulis, terjadinya kerancuan-kerancuan konseptual, inkonsistensi, dan ambiguitas seperti itu diakibatkan oleh tiga faktor, yaitu: (1) HISPIPSI sebagai organisasi akademik dan profesional komunitas pakar IPS di Indonesia belum terlibat dan atau dilibatkan secara aktif dalam proses penyusunan kurikulum IPS-SD. Seperti diduga Winataputra (2001), bahwa kondisi ini disebabkan karena pengaruh akademis dari komunitas ilmiah ini terhadap pengembangan IPS sangat terbatas, sebatas yang tersalur melalui anggotanya yang kebetulan dilibatkan dalam berbagai kegiatan penyusunan kurikulum IPS. Perkembangan kurikulum dan pembelajaran IPS sebagai ontologi IPS sampai saat ini sangat bergantung pada pemikiran individual dan atau kelompok pakar yang ditugasi secara insidental untuk mengembangkan perangkat kurikulum IPS melalui Pusbangkurrandik-Balitbang Depdiknas; (2) hingga saat ini, HISPIPSI belum mengembangkan lebih jauh paradigma IPS persekolahan yang secara akademik sudah disepakati hingga pada tataran kurikulum. Sehingga, paradigma kurikulum IPS-SD seakan “terlepas” dari hasil-hasil konsensus di kalangan pakar IPS yang berhimpun di dalam HISPIPSI. Indikasi ini dapat

dicermati dari realitas bahwa definisi akademik IPS tak pernah digunakan sebagai definisi kurikuler IPS-SD, tidak juga di dalam Permendiknas, kecuali di dalam KBK-IPS SD tahun 2002, sebagaimana sudah dikemukakan di atas; dan (3) pemberlakuan “paradigma tunggal” (*single paradigm*) dalam penyusunan kurikulum di semua jenjang pendidikan persekolahan. Sementara, setiap mata pelajaran memiliki karakteristik dan paradigma masing-masing, yang berimplikasi terhadap perlunya “paradigma jamak” (*multiple paradigm*) dalam penyusunan kurikulum setiap mata pelajaran pada setiap jenjang pendidikan persekolahan.

### **KOMPETENSI IPS-SD DALAM KONTEKS SK-KMP IPTEK**

Berkaitan dengan rumusan standar isi dan kompetensi IPS-SD di dalam Permendiknas no. 22 dan 23 tahun 2006, ada sejumlah pertanyaan besar yang bisa diajukan adalah: “apa dasar pemikiran pengelompokan mata pelajaran?” “apa dasar pemikiran menempatkan IPS-SD dalam kelompok mata pelajaran IPTEK?” “Apa makna kompetensi mata pelajaran IPS-SD dalam keseluruhan struktur SK-KMP IPTEK?” Juga menjadi pertanyaan dan tidak jelas dasar pemikirannya adalah, “mengapa IPS-SD tidak dimasukkan pula

ke dalam kelompok mata pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian, dan dalam kelompok mata pelajaran Agama dan Akhlak Mulia?” Tujuan kelompok mata pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian untuk “membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”, secara epistemologis juga merupakan salah satu pilar epistemologis IPS-SD. Dalam historiografi *Social Studies* di Amerika atau IPS di Indonesia dikenal sebagai tradisi “*citizenship education*” atau “*citizenship transmittion*”, bertujuan membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air (lihat: Barr, Barth, & Shermis, 1978; Winataputra, 2001a, 2001b, 2005; Somantri, 2001). Demikian pula tujuan kelompok mata pelajaran Agama dan Akhlak Mulia, yaitu “membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia”, menjadi salah satu tujuan IPS-SD. Melalui pembentukan dan pengembangan pengertian dan kesadaran siswa terhadap pengetahuan, nilai, sikap, norma-norma di dalam berbagai konteks realitas kehidupan masyarakat yang mereka pelajari melalui IPS-SD, pembentukan iman, takwa, dan akhlak siswa sebagai anggota masyarakat niscaya bisa dicapai (Stopsky & Lee, 1994;

Winataputra, 2001a, 2001b; Somantri, 2001; Farisi, 2005).

Permendiknas menjelaskan bahwa dasar pengelompokan mata pelajaran dalam kelompok mata pelajaran tertentu “dikembangkan berdasarkan tujuan dan cakupan muatan dan/atau kegiatan setiap kelompok mata pelajaran”. Dalam konteks mata pelajaran IPS-SD, hal tersebut dapat ditafsirkan bahwa penempatan IPS-SD dalam kelompok mata pelajaran IPTEK, karena tujuan dan cakupan muatan dan/atau kegiatan mata pelajaran IPS-SD sesuai dengan tujuan dan cakupan muatan dan/atau kegiatan dari kelompok mata pelajaran IPTEK. Tentang kelompok mata pelajaran IPTEK ini, Permendiknas menyatakan bahwa “cakupan kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SD/MI/SDLB dimaksudkan untuk mengenal, menyikapi, dan mengapresiasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menanamkan kebiasaan berpikir dan berperilaku ilmiah yang kritis, kreatif dan mandiri, atau mengembangkan logika, kemampuan berpikir dan analisis peserta didik”.

Bila demikian, menjadi pertanyaan “apakah tujuan dan cakupan muatan dan/atau kegiatan mata pelajaran IPS-SD hanya terfokus pada kompetensi-kompetensi intelektual-keilmuan semata, dan sama sekali tidak memuat kompetensi personal dan sosio-

kultural, yang sebenarnya merupakan „*critical competencies*“ dalam IPS-SD?“. Dalam hal ini, jelas bahwa IPS-SD di dalam Permendiknas dipandang terlalu sempit dan sangat tidak memadai untuk membangun ketiga struktur dasar kompetensi dan mencapai tujuan IPS-SD secara utuh seperti yang termuat di dalam SK IPS-SD dan KD IPS-SD. Selanjutnya, penulis beranggapan bahwa penempatan IPS-SD „*hanya*“ di dalam kelompok mata pelajaran IPTEK, dan tidak di dalam kelompok mata pelajaran yang lain, misalnya dalam kelompok mata pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian, dan kelompok mata pelajaran Agama dan Akhlak Mulia, juga mengindikasikan bahwa IPS-SD dalam Permendiknas secara paradigmatik telah diposisikan dan diperankan sebagai instrumen „pendidikan keilmuan“ atau „pendidikan disiplin ilmu“ dengan fokus pada pengembangan satu dimensi saja dari jati diri siswa sebagai manusia, yakni dimensi intelektual. Dengan pemikiran seperti itu, maka IPS-SD dalam Permendiknas semakin dijauhkan dari jati diri dan komitmennya sebagai program „pembudayaan dan pemberdayaan“ manusia Indonesia yang bertolak dari jati diri manusia yang lebih asasi

yaitu sebagai makhluk personal dan sosiokultural.

Dalam penafsiran penulis, hal ini mungkin karena adanya kesulitan untuk merumuskan „*core competencies*“ dalam SK-KMP IPTEK yang bisa meng-*coverage* enam mata pelajaran yang terdapat di kelompok mata pelajaran IPTEK. Kesulitan yang sama juga pernah dihadapi oleh Pusat Kurikulum ketika mengembangkan kurikulum IPS-SD model „*broad-field curriculum*“ tahun 1975 dan 1984, dan „*integrated curriculum*“ tahun 1994/1999. Ketika Bruner menggagas kurikulum model „*structured curriculum*“ sebagai paradigma utama dalam proyek pengembangan kurikulum IPS-SD di era „*the New Social Studies*“ pada tahun 1960an, juga mengalami kesulitan seperti itu (Hasan, 1993). Realitas ini, semakin menguatkan pandangan penulis, bahwa dalam Permendiknas terdapat kerancuan-kerancuan konseptual, inkonsistensi, dan ambiguitas paradigmatik yang sangat membingungkan.

Menempatkan IPS-SD dalam kelompok mata pelajaran IPTEK dengan tujuan dan cakupan seperti itu, jelas masih jauh dari harapan para pakar dan pengembang IPS-SD untuk mendapatkan payung hukum dalam ikhtiar ke arah pembentukan manusia Indonesia yang tidak hanya cerdas secara intelektual-

keilmuan, tetapi juga manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, demokratis, dan bertanggung jawab (UUSPN, psl. 3). Merujuk pada pandangan Hasan (1996; 2004), bahwa menempatkan IPS-SD dalam kerangka pemikiran seperti itu, adalah pandangan yang sempit. Sejalan dengan itu, maka IPS-SD tidak akan banyak memiliki kontribusi dan signifikansi bagi pencapaian tujuan dan cita-cita luhur bangsa Indonesia, sebagaimana dituangkan di dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, bahwa pendidikan nasional harus mampu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; serta secara aktif mengembangkan kapasitas siswa untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

## **PENUTUP**

Struktur dasar kompetensi IPS-SD diorganisasi dari kompetensi personal, sosial, dan intelektual-keilmuan. Ketiga

kompetensi IPS-SD tersebut dikembangkan sebagai jalinan struktur kompetensi yang utuh di dalam SKL-MP, SK-MP, dan KD-KMP IPS-SD, dengan komposisi yang berbeda untuk masing-masing kompetensi. Struktur dasar kompetensi IPS-SD dikembangkan dari paradigma IPS-SD sebagai “pendidikan berbasis intelektual-keilmuan”, bukan sebagai “pendidikan keilmuan”. Paradigma IPS-SD ini, secara historis telah menjadi *mainstream* di dalam pengembangan kurikulum IPS-SD sejak 1968 hingga Permendiknas no. 22 dan 23 tahun 2006.

Dalam konteks perkembangan kurikulum, paradigma IPS-SD sebagai pendidikan berbasis intelektual-keilmuan, masih ditemukan adanya kerancuan-kerancuan konseptual, inkonsistensi, dan ambiguitas antara definisi, tujuan, dan organisasi bahan kajian kurikulum IPS-SD; dan penempatan IPS-SD dalam kelompok mata pelajaran IPTEK yang tidak mengakomodasi cakupan dan tujuan utuh IPS-SD. Diduga penyebabnya adalah karena: (1) ketidakterlibatan aktif secara organisatoris HISPIPSI sebagai organisasi akademik dan profesional komunitas pakar IPS di Indonesia dalam proses penyusunan kurikulum IPS-SD; (2) belum dikembangkannya paradigma IPS hingga pada tataran kurikulum; dan (3) pemberlakuan “paradigma

tunggal” (*single paradigm*) dalam penyusunan kurikulum. Sementara, setiap mata pelajaran memiliki karakteristik dan paradigma masing-masing, yang berimplikasi terhadap perlunya “paradigma jamak” (*multiple paradigm*) dalam penyusunan kurikulum setiap mata pelajaran pada setiap jenjang pendidikan persekolahan.

Struktur dasar kompetensi IPS-SD dan paradigma pengembangannya, harus dicermati dan dijadikan acuan oleh setiap satuan pendidikan SD dalam pengembangan kurikulum (KTSP) sebagai kurikulum operasional dan silabusnya, agar penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai standar isi dan standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan bagi satuan pendidikan SD dapat dicapai.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Barr, R.D., Barth, J.L., & Shermis, S.S. (1977). *Defining the Social Studies*. Virginia: National Council for the Social Studies.
- Bruner, J.S. (1978). *The Process of Education*. Cambridge: Harvard University Press.
- Conrad, C.F. & Haworth, G.H. (eds). (1995). *Revisioning Curriculum in Higher Education*.
- Depdikbud. 1986. *Kurikulum Sekolah Dasar: Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP)*. Jakarta: Ditjen Dikdasmen, Direktorat Dikdas.
- Depdikbud. (1994). *Garis-Garis Besar Program Pengajaran*. Lampiran II Kepmen-dikbud Nomor 060/U/1993, tentang Kurikulum Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar), Jakarta: Balitbang-Pusbangkurandik.
- Depdikbud. (1999). *Penyempurnaan/Penyesuaian Kurikulum 1994 (Suplemen GBPP Matapelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial untuk Satuan Pendidikan SD/MI)*. Jakarta: Depdikbud.
- Depdiknas. (2002). *Kurikulum Berbasis Kompetensi Matapelajaran Pengetahuan Sosial Sekolah Dasar*. Jakarta: Pusbangkurandik.
- Depdiknas. (2003). *Kurikulum Berbasis Kompetensi Matapelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan Pengetahuan Sosial Sekolah Dasar*. Jakarta: Pusbangkurandik, Depdiknas.
- Dewey, J. (1910). *How We Think*. tersedia di: [www.spartan.ac.brocku.ca/~lward/dewey/dewey1910.html](http://www.spartan.ac.brocku.ca/~lward/dewey/dewey1910.html) [10 Juni 2002].
- Dewey, J. (1962). *Child and Curriculum. The School and Society*. London: University of Chicago Press.

- Dewey, J. (1964). *Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education*. New York: Mcmillan Co.
- Dimiyati, M. (1989). *Pengajaran Ilmu-ilmu Sosial di Sekolah: Bagian Integral Sistem Ilmu Pengetahuan*. P2LPTK-Ditjen Dikti., Depdikbud.
- Farisi, M.I. (2005). *Rekonstruksi Dasar-dasar Pemikiran Pendidikan IPS-SD Berdasarkan Perspektif Konstruktivisme*. Disertasi tidak diterbitkan. Bandung: PPS-UPI.
- Gardner, P.L. (1975). Science and the Structure of Knowledge. Dalam Gardner, P.L. ed. (1975) *The Structure of Science Education*. Hawthorn Victoria Australia: Longman Australia Pty Limited. Hlm. 1—40.
- Hasan, S.H. (1993). Tujuan Kurikulum Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). *Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial (JPIS)*. edisi perdana. 92-101.
- Hasan, S.H. (2002b). Pendidikan Sering Hanya Sebatas Transfer Ilmu: Tidak Membangun Karakter Siswa dan Nilai Sosial. dalam *Pikiran Rakyat*, 29 Nopember 2002.
- Jarolimek, J. (1977). *Social Studies in Elementary School*, (5<sup>th</sup> edition). New York: Mc Millan Publishing Co, Ltd., Collier McMillan Publisher Company.
- Kuhn, T.S. 2000. *The Structure of Scientific Revolutions: Peran Paradigma Dalam Revolusi Sains*. Terjemahan Tjun Surjaman. Bandung: PT. Remadja Rosda Karya.
- Olivia, P.F. (1997). *Developing the Curriculum*. (4<sup>th</sup> edition). New York: Longman
- Saxe, D.W. (1991). *Social Studies in Schools: A History of The early Years*. New York: State University of New York Press.
- Shaver, J.P. (1977). Comment on Robert D. Barr, James L. Barth and S. Samuel Shermis, Defining the Social Studies. Lampiran dalam Barr, R.D., Barth, J.L., & Shermis, S.S. (1977). *Defining the Social Studies*. Virginia: National Council for the Social Studies.
- Soedijarto, H. 2004. Kurikulum, Sistem Evaluasi, dan Tenaga Pendidikan sebagai Unsur Strategis dalam Penyelenggaraan Sistem Pengajaran Nasional. Dalam *Jurnal Pendidikan Penabur* - No.03 / Th.III / Desember 2004.
- Soedjipto, R. Ed. (1980). *Metodologi Ilmu Pengetahuan Sosial*. Jakarta: Depdikbud.
- Somantri, N. (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Dedi Supriadi & Rohmat Mulyana (ed).



- Bandung: PPS-FPIPS UPI dan PT. Remadja Rosda Karya.
- Stanley, W.B. (1985). *Research in Social education: Issues and Approaches*. dalam Stanley, W. (ed). *Review of research in Social Studies Education: 1976-1983*. New York: NCSS. 1-10.
- Stopsky, F. & Lee, S.S. (1994). *Social Studies in a Global Society*. Columbia: Delmar Publ. Inc.
- Sumaatmadja, N. (2003). Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial pada Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah. dalam *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*. No.20 Tahun XI, edisi Januari – Juni 2003. 28-35.
- Taba, H. (1962). *Curriculum Development: Theory and Practice*. New York: Harcourt Brace & World Inc.
- Taba, H. et.al (1971). *A Teacher's Handbook to Elementary Social Studies: An Inductive Approach*. Massachussetts: Addison-Wesley Publishing Company.
- Welton, D.A. & Mallan, J.T. (1987). *Children and Their World: Strategies foe Teaching Social Studies*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Winataputra, U.S. (2001a). *Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi (Suatu Kajian Konseptual dalam Konteks Pendidikan IPS)*. Disertasi tidak diterbitkan. Bandung: PPS-UPI.
- Winataputra, U.S. (2001b). *Reorientasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Mengantisipasi Perubahan Sosial di Era Global*. Makalah Seminar Nasional dan Kongres Forum Komunikasi X Pimpinan FPIPS/FIS/FKIP Universitas/IKIP se Indonesia serta Kongres HISPIPSI, 22-24 Oktober.
- Winataputra, Udin S. et.al. (2005). *Materi dan Pembelajaran IPS SD*. Cet. Ke-6. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Wiriaatmadja, R. (2003). Pembelajaran IPS di Tingkat Sekolah Dasar. Dalam *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*. No.20 Tahun XI, edisi Januari – Juni 2003. 22-27.